

PENERAPAN POLITIK PENDIDIKAN
(Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam
Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram)

Muhammad Ith'am
Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan
Telp. 082141585786
Email. Itam19859@gmail.com

Abstrak : Pendidikan dan politik merupakan dua unsur penting dalam sistem sosial politik disetiap negara maju maupun negeara berkembang sekalipun. Kedua unsur tersebut memiliki hubungan dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu negara, artinya antara pendidikan dan politik saling menunjang dan saling mengisi sehingga tercipta hubungan yang dinamis, Hubungan antara politik dan pendidikan adalah realistik empiris yang terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian ilmuan di Dunia.

Berdasarkan perolehan sumber datanya, penelitian ini termasuk *Library Research*, karena data diperoleh dengan cara penelusuran pustaka. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji "Penerapan Politik Pendidikan"(Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram) antara lain: Pendekatan fenomenologis, Pendekatan deskriptif, Pendekatan analisis. fokus penelitian yang diambil terdapat tiga masalah yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu: pertama, Bagaimana Makna politik pendidikan dalam persepektif negara Islam? kedua, Bagaimanakah kebijakan Politik pendidikan yang dirumuskan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma di Masa kerajaan Mataram? Ketiga, Bagaimanakah implikasi kebijakan politik pendidikan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma terhadap pendidikan Islam pada masa kerajaan Mataram? Makna politik pendidikan dalam persepektif negara Indonesia adalah suatu proses pendekatan atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi prinsip hidup. Kebijakan politik pendidikan yang di rumuskan oleh Sultan Agung Hanyakrakususma dalam bidang pendidikan Islam, adalah : Menawarkan tanah pendidikan yang disebut dengan tanah *perdikan*, yaitu sebuah lokasi untuk kepentingan kehidupan beragama yang dibebaskan.Implikasi kebijakan politik pendidikan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma terhadap pendidikan Islam pada masa kerajaan Mataram memberikan dampak positif dan rakyat sangat apresiatif dengan usaha yang dilakukan Sultan Agung Hanyakrakusuma,

Kata Kunci : Politik Pendidikan, Kebijakan, Sultan Agung Hanyakrakusuma Dan Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Kneller secara umum beteorinya bahwa antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*,¹ demikian pula pendidikan agama yang realitasnya diupayakan oleh setiap komunitas beragama di Indonesia. Disinilah dapat dilihat esensi dari istilah politik pendidikan dan politik pendidikan agama, ia didefinisikan sebagai endapan dari politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, dan sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan.²

Dinamika hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik terus meningkat dalam suatu masyarakat, seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Di sebuah negara berkembang, dinamika hubungan antara pendidikan dan politik cenderung lebih tinggi dari pada di negara maju, dikarenakan perubahan-perubahan di suatu negara berkembang terjadi lebih intens. Intensitas dari perubahan tersebut sangat nyata dalam proses yang menghantarkan negara jajahan menuju negara kemerdekaan.

Interelasi antara pendidikan dan politik akan berimplikasi pada semua dataran, baik pada dataran filosofis maupun dataran kebijakan. Misalnya, di Indonesia, filsafat pendidikan nasional adalah artikulasi pedagogis dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada dataran kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintahan tersebut. Pada gilirannya, implementasi dari suatu kebijakan pendidikan akan berdampak pada kehidupan politik. Berbagai kebijakan pendidikan berdampak langsung pada akses, minat, dan kepentingan pendidikan para *stakeholder* pendidikan, terutama orang tua dan peserta didik, serta masyarakat pada umumnya.³

¹ George F Kneller, *Politik Ideologis dalam George F. Kneller (ed), Foundations of Education* (New York: John Wiley dan Sons, 1983), 128.

² Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Mandor Maju, 1997), 28.

³ *Ibid.*, 12-13.

Bukti empiris adanya keterkaitan antara politik dan pendidikan Islam yaitu Madrasah Nizhamiyah di Baghdad yang menjadi corong pesan-pesan politik, Rasyid menyimpulkan dari analisis terhadap kasus Madrasah Nizhamiyah sebagai berikut:

Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariat Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syariat. Umat tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Bila politik (kekuasaan) berfungsi mengayomi pembenahan lewat arus bawah (Rasyid, 1994:15).

Pada masa Kerajaan Mataram, bukti yang kuat adanya keterkaitan antara politik dan pendidikan antara lain dengan adanya *perdikan* sebagai langkah praksis dalam mengembangkan pendidikan Islam, demikian dikatakan bahwa *perdikan* artinya adalah tempat (desa) yang mendapatkan kebebasan atas perintah raja, sehingga desa atau tempat tersebut bebas dari pembayaran pajak atau kerja rodi yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan.⁴

Pendidikan Islam jika dihadapkan pada politik pendidikan tentunya politik pendidikan memiliki peranan penting dalam mengembangkan pendidikan Islam. Peran Sultan Agung Hanyakrakusuma yang notabene memegang kekuasaan pada waktu itu tentu menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan pendidikan Islam yang bermutu, terbukti dengan usahanya menawarkan tanah pendidikan bagi kaum santri serta menciptakan iklim sehat bagi kehidupan intelektualisme keagamaan hingga komunitas ini berhasil mengembangkan lembaga pendidikan mereka tidak kurang dari tiga ratusan.

Politik Pendidikan : Politik pendidikan dimaknai sebagai suatu proses pendekatan atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini menjadi prinsip hidup. Semisal tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Sehingga

⁴ Hanun Asrohah, *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 75-76.

terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.

Kebijakan :Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebijakan yang menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan.⁵ Sehingga bertolak dalam pemahaman ini, kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah dalam ranah pendidikan sehingga rangkaian sistem yang dimaksud di atas adalah bagian dalam kebijakan pendidikan yang diemban oleh pemerintah.

Sultan Agung Hanyakrakusuma : Nama kecilnya adalah Raden Mas Jatmika⁶ atau Den Mas rangsang⁷ atau Sultan Agung Senopati Ingalaga Abdurahman (Raja Ke III Mataram) Prabu Pandita Hanyakrakusuma⁸, adalah putra dari raja Hanyakrawati. Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah putra tertua yang lahir dari istri utama (*garwa padmi*), Ratu Adi, putri asal Pajang.

Pendidikan Islam : Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak didik untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perolehan sumber datanya, penelitian ini termasuk *Library Research* (Zed, 2004: 1), karena data diperoleh dengan cara penelusuran pustaka. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji *Penerapan Politik Pendidikan (Studi Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram)*. Adapun pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan fenomenologis Fenomenologis adalah apa yang dikatakan dan dilakukan orang sebagai produk dari cara orang tersebut menafsirkan dunianya

⁵Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim PRESS, 2010), 3.

⁶ H. J. De Graaf, *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), 33

⁷ Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1994), 25.

⁸ Purwadi, *The History of Javanese Kings* (Yogyakarta: Ragam Media, 2010), 309.

(Furchan, 1992: 35). Dimungkinkan ada bentuk-bentuk pendapat lain untuk memahami Penerapan Politik Pendidikan Islam dari sudut pandang yang berbeda.

Pendekatan deskriptif Bahwa semua yang berhubungan dengan Penerapan Politik Pendidikan akan diuraikan apa adanya, dengan maksud untuk memahami alur makna yang terkandung dalam buku yang membahas tentang Penerapan Politik Pendidikan Islam (Nasir, 2005: 54).

Pendekatan analisis Bahwa Penerapan politik Pendidikan Islam, akan dianalisis secara kritis, sehingga dapat diketahui Makna Politik Pendidikan Islam di Indonesia dan Kebijakan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Kerajaan Mataram, sehingga diketahui Bagaimana Makna Politik Pendidikan dalam persepektif Negara Indonesia Dan Bagaimana Kebijakan Politik pendidikan yang dirumuskan oleh Sultan Agung hanyakrakusuma Di kerajaan Mataram (Furchan dan Maimun, 2005: 72).

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai politik pendidikan Islam dalam kaitannya dengan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam mengembangkan pendidikan Islam pada masa kerajaan Mataram yaitu dengan melakukan penulisan pustaka (percetakan). Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam teknik pengumpulan data adalah dengan membaca literatur-literatur yang relevan.

Teknik Analisis Data Dalam hal analisis data kualitatif (Sugiyono, 2006: 274) menyatakan bahwa:

"Analysis of any kind involve a way of thinking. It refers to the systematic examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the relationship to the whole. Analysis a search for patterns"

"Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah mencari pola."

HASIL PENELITIAN

Pengertian Politik Pendidikan Pengertian politik secara etimologis yang disebutkan di dalam buku Pendidikan Agama Islam karangan Mohammad Daud Ali yang dikutip oleh Ali Muhdi Amnur, bahwa politik berasal dari Bahasa Latin *Politicus* atau Bahasa Yunani *politicos* yang artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau dengan warga kota.⁹

Berbeda dari pengertian di atas, definisi politik yang disebutkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: *Pertama*, pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan. *Kedua*, segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya, tentang pemerintahan ataupun terhadap negara lain. *Ketiga*, kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi suatu masalah tertentu.¹⁰

Secara singkat politik dapat dikatakan suatu cara atau metoda mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mencapai tujuan kelompok.

Pengertian pendidikan secara jelas disebutkan oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Makna dari politik dan pendidikan jika dihubungkan, maka politik pendidikan dimaknai sebagai suatu proses pendekatan atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi prinsip hidup. Semisal tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Sehingga terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.

⁹ Ali Muhdi Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Jogjakarta: Pustaka Fahima, 2007), 1.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

¹¹ UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 2003), 3.

***Perdikan* Sebagai Langkah Praksis dalam Mengembangkan Pendidikan Islam** Sebagai wujud besarnya perhatian Sultan Agung terhadap pendidikan Islam, ia menawarkan tanah pendidikan bagi kaum santri serta menciptakan iklim sehat bagi kehidupan intelektualisme keagamaan hingga komunitas ini berhasil mengembangkan lembaga pendidikan mereka tidak kurang dari tiga ratusan pesantren. Tanah perdikan, tanah dengan beberapa privileges adalah sebuah lokasi untuk kepentingan kehidupan beragama yang dibebaskan dari pajak Negara. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa tanah perdikan meluas menjadi sebuah kampung khusus yang memiliki fungsi keagamaan seperti menjaga tempat-tempat suci, merawat dan mengembangkan pesantren serta menghidupkan Masjid.¹²

Kata *perdikan* sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang mengabdikan pada agama yang dianutnya. Menurut Fokkens, kata *perdikan* diambil dari istilah *mahardhika*, namun istilah ini digunakan oleh kususasteraan Jawa untuk rohaniawan, seperti “*rahib*” atau “*bikhu*”. *Mahardhika* dalam sansekerta memiliki arti keramat atau sangat bijaksana atau juga alim.¹³ *Mahardhika* adalah rohaniawan yang menikmati pembebasan dari beban pajak dan kerja rodi. Dari *mahardhika* menjadi ucapan *merdika*. Menurut Schrieke, arti “*rahib*” atau “*bikhu*” lama-kelamaan hilang, lalu kata “*merdhika*” hanya dimaksudkan untuk rohaniawan yang menikmati pembebasan pajak dan kerja rodi. Bahkan arti “*merdhika*” menjadi melulu bebas dari beban-beban kerajaan. Pada masa berikutnya hingga masa Kerajaan Mataram, di samping dikenal istilah lama yaitu *lepasaken*, juga dipakai istilah sinonim *merdikaken* dalam arti memberikan tanah sebagai tanah bebas atau memberikan kebebasan.¹⁴ Akhirnya, tanah-tanah yang disebut sebagai *sima* atau *swantatra* yang adalah bahasa Jawa disebut *perdikan*, yang berasal dari kata *merdhika* yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”,

¹²Karel A Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 165 -172.

¹³ Fokkens, *Vrije Desa's op Java en Modera* dalam *TBG*, XXXI, 1886, 478. Lihat juga Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 169.

¹⁴ Schrieke, *Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan*, Terjemah oleh Suhardjo Hatmosuprobo dari *Lets Over Bet Perdikan-Institute* (Jakarta: Bhratara, 1975), 26.

yang secara makna menunjukkan arti tempat. *Perdikan* artinya adalah tempat (desa) yang mendapatkan kebebasan dari pembayaran pajak atau kerja rodi, kata *perdikan* sama halnya dengan kata *santri* yang kemudian mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi *pesantren* yang menunjukkan arti tempat, yakni tempat para santri mencari ilmu serta bermukim di *pesantren*.¹⁵

Kebijakan Pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma

Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah raja yang memiliki keutamaan tersendiri, di mata masyarakat Mataram ia adalah raja yang sangat berwibawa dan ia dianggap sebagai raja yang paling cemerlang, dipandang berhasil, dan juga dipandang mampu menggerakkan kekuatan rakyat dalam skala yang dapat dikatakan paling berhasil dibandingkan dengan penguasa-penguasa sebelum Sultan Agung Hanyakrakusuma. Masa kejayaan dan kesuksesan Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam membangun peradaban Mataram walaupun sudah lama terjadi, namun tetap mendapat sentuhan spesial yang kemudian pada akhirnya menjadi identitas penting bagi masyarakat Jawa yang begitu memuliakan dengan memberikan penghargaan tertinggi kepada pemimpin mereka yang dianggap berhasil. Sehingga, di tangan masyarakat Jawa, sejarah tentang kepemimpinan tersimpan rapi dan tetap terjaga dengan baik.

Masyarakat Jawa menganggap, bahwa seorang sultan atau raja memiliki kemampuan mistik yang tinggi. Kepercayaan terhadap hal ini memiliki implikasi tersendiri terhadap fakta kehidupan bahwa pada situasi tertentu seorang sultan dengan rakyatnya ibarat seorang hamba kepada tuannya yang mempunyai nuansa yang khas karena hubungan antara hamba dan tuan sedikit berbeda dengan tujuan mistik, yakni pembedaan antara pemimpin (superior) dan yang menjadi bawahan (inferior) tidak mencari, dan hamba dalam hal apapun tidak menyatu dengan tuan. Moertono dalam tulisannya menuturkan, bahwa artikulasi hubungan politik diikhtisarkan ke dalam tiga hal. *Pertama*, hubungan pribadi yang akrab, disertai dengan perasaan saling mengasihi dan menghormati dianggap pula sebagai pola atau model baku dalam komunikasi sosial. *Kedua*, takdir menetapkan kedudukan

¹⁵ Hanun Asrohah, *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012), 75-76.

manusia dalam masyarakat sehingga masing-masing harus memainkan peran, terutama dalam pemerintahan. *Ketiga*, penguasa (dan para pejabatnya), dari segi kebijaksanaan pemerintahan praktis, haruslah memperhatikan masyarakatnya seperti halnya orang tua mengasuh putra-putrinya. Dengan demikian, sejatinya penguasa memiliki sikap yang unggul dan superioritas yang melindungi dan yang dilindungi memiliki sikap pengabdian yang murni dan tulus.¹⁶

Hubungan antara hamba dan tuan dalam masyarakat tradisional Jawa bukan bersifat tak pribadi, sebaliknya hubungan ini lebih merupakan ikatan pribadi dan akrab dan saling menghormati. Hal semacam ini juga lumrah pada hubungan sosial, sikap yang demikian terlihat pada masyarakat Jawa yang menyapa orang asing dengan panggilan *ki sanak* ataupun *sederek*, yang kedua kata itu berarti kerabat. Dan peribahasa yang menyatakan *tuna satak bathi sanak* yang artinya rugi sedikit uang tetapi untuk dapat kerabat menunjukkan bahwa dalam sifat dagang yang notabene mencari untungpun kehilangan keuntungan dianggap layak, bila seseorang dapat memperoleh kerabat sebagai gantinya.¹⁷

Sultan Agung Hanyakrakusuma adalah *ami>r al-mukmini>n* yang dimaknai oleh masyarakat Jawa dalam Sastra Gedging bahwa raja memiliki tanggung jawab moral sebagai raja yang mengatur kehidupan beragama. Dalam hal ini, raja dituntut untuk memiliki lapang dada dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang menjadi keniscayaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, untuk menjelaskan ke-*ami>r al-mukmini>n*-annya harus dilihat kebijakan-kebijakan yang telah ia lakukan dalam berbagai bidang, diantaranya:

1. Bidang Pendidikan Islam

Pada abad-abad ke-17, setelah masa Walisongo, lembaga pendidikan pesantren semakin mendapatkan posisi di masyarakat, dikarenakan penguasa kerajaan saat itu menaruh perhatian yang besar bagi pendidikan Islam, tak lain motifnya adalah untuk memajukan pendidikan Islam, adapun usaha yang

¹⁶ Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in Old Java: A Study of The Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Monograph Series, Modern Indonesian Project, Southeast Asia Program. Departmen Asian Studies, Cornell University. Ithaca (New York: Cornell Modern Indonesian Project, 1968), 26.*

¹⁷ Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha-usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), 17-18.*

dilakukan adalah dengan memelopori usaha-usaha untuk memajukan dunia pendidikan dan pengajaran Islam.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Makna politik pendidikan dalam persepektif negara Indonesia adalah suatu proses pendekatan atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikehendaki, sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang selama ini menjadi prinsip hidup. Semisal tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Sehingga terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional serta pembentuk bangsa yang berkarakter.

Kebijakan politik pendidikan yang di rumuskan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma dalam bidang pendidikan Islam, adalah:

- a. Menawarkan tanah pendidikan yang disebut dengan tanah *perdikan*, yaitu sebuah lokasi untuk kepentingan kehidupan beragama yang dibebaskan. Konteks kebebasan yang diberikan adalah kebebasan dari membayar pajak atau kerja rodi.

Implikasi kebijakan politik pendidikan yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma terhadap pendidikan Islam pada masa kerajaan Mataram memberikan dampak positif dan rakyat sangat apresiatif dengan usaha yang dilakukan Sultan Agung Hanyakrakusuma, dengan Mengkategorisasikan pendidikan yang kemudian dibagi tingkatan-tingkatan pesantren itu kepada beberapa tingkatan, yaitu:

- a) Tingkat pengajian al-Quran, tingkat ini terdapat pada setiap desa, yang diajarkan meliputi hurur hijaiyah, membaca al-Quran, berzanji, rukun Islam dan rukun Iman.
- b) Tingkat pengajian kitab. Para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam al-Quran. Tempat belajar biasanya di serambi masjid dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar di sini diberi gelar *Kiai Anom*. Kitab yang mula-mula diajarkan dan dipelajari adalah kitab-kitab 6 Bis, yaitu sebuah kitab yang berisi 6 *Bismillahi al-Rahmani al-Rahimi*.

Kemudian dilanjutkan dengan *Matan al-Tqrib* dan *Bidayatu al-Hidayah* karangan Imam Ghazali.

- c) Tingkat pesantren besar. Tingkat ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Cabang-cabang ilmu yang diajarkan adalah *fiqh*, *tafsir*, *hadith*, *ilmu kalam*, *tasawwuf*, dan sebagainya.
- d) Pondok pesantren tingkat keahlian (takhassus). Ilmu yang dipelajari pada tingkat ini adalah suatu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkat ini adalah tingkat yang spesial.

Dari pemaparan yang telah dituangkan dalam karya ini, penulis menyadari jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap hasil karya tulis ini dapat:

- a. Menambah ruang cakrawala ilmu pengetahuan mengenai pendidikan bagi semuanya.
- b. Bagi masyarakat luas dapat mempelajari karya-karya kuno yang penuh dengan makna tersebut agar warisak kekayaan intelektual dalam sejarah pendidikan Islam terutama tidak hilang begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrasyi (al), Muhammad Athiyah. *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Daar al-Fikr al-'Arabi: 1962.
- Achmadi, Abu. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Amnur, Ali Muhdi. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Asrohah, Hanun. *Transformasi Pesantren: Pelembagaan, Adaptasi, dan Respon Pesantren dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya, 2012.
- Attas (al), Muhammad al-Naquib. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1998.

- Bahreis, Hussein. *Ajaran-ajaran Akhlak Imam Ghazali*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1981.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Daryanto. *Sultan Agung; Tonggak Kokoh Bumi Mataram*. Yogyakarta: Dipta, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sastra gendhing*. Yogyakarta: Proyek Javanologi, t.t.
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawaen, Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Graaf, H. J. De. *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- _____ *Awal Kebangkitan Mataram; Masa Pemerintahan Senopati*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1987.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam Jilid IV*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Haq, M. Zaairul. *Nasionalisme Religius Kesultanan Mataram*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Harun, Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1994.
- Hisbullah. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam, Kamil al-Din. *Usjul al-Fiqh al-Islami*, Bairu : Dar al-Fikr, 1969.
- Jundi (al), M. Al-Sahad. *Qowa'id al-Tammiyyah al-Istishjâdiyyah fi al-Qanu'n al-Ju'ali wa al-Fiqh al-Islami*. Qahirah: Dar al-Mandah, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Ilmu Pendidikan Teroritis*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

-
- Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional.*
Bandung: Mandor Maju, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Kneller, George, F. *Politik Ideologis dalam George F. Kneller ed, Foundations of Education.* New York: John Wiley dan Sons, 1983.
- Langgulang, Hasan. *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan.* Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1989.
- Mara>ghi (al), Musthafa. *Tafsi>r al-Mara>ghi.* Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1962.
- Moedjianto. *Konsep Kekuasaan Jawa; Penerapannya oleh Raja-raja Mataram.* Yogyakarta: Kanisus, 1994.
- Moertono, Soemarsaid. *Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan.* Jakarta: Sinar Harapan, 1984.